

UJI KEBERFUNGSIAN DIFERENSIAL RASCH PADA SKALA PERSEPSI TERHADAP POLITIK IDENTITAS KELAS MENENGAH MUSLIM

Lucky Purwantini¹, Ainur Rofieq²

¹ Program Studi Psikologi, Universitas Islam "45" Bekasi
(purwantini.lucky@gmail.com)

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam "45" Bekasi
(ainur.rofieq75@gmail.com)

Abstract

The emergence of the 411 and 212 Defend Islamic Action movements in the election for the Governor of DKI Jakarta indicates the rise of identity politics. Interestingly, all of these movements are dominated by the Muslim middle class who are politically apolitical, conservative on religious values, but also part of a consumerist society, so the question of this research is how the perception of the Muslim middle class towards identity politics is associated with the emergence of the Action movement. Defend Islam 411 and 212. To understand the formation of identity politics, according to Buchari there are three ways, namely: legitimate identity, resistant identity, and project identity. The data was collected using a scale of perceptions of identity politics in the Muslim middle class and analyzed using the Rasch model. The Differential Functioning Test (DIF) is used to detect bias in items. The DIF results show that 9 items on the perception politics of identity scale have no bias towards both men and women. In addition, the DIF results also show that the 9 items of the perception scale on identity politics also do not have a bias either on subjects who are members of religious organizations or who are not members of religious organizations.

Keywords : Politic Identity, Muslim Middle Class, DIF, Rasch

I. PENDAHULUAN

Peristiwa "penistaan agama" yang menimpa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menimbulkan gerakan yang dilakukan oleh sejumlah kalangan umat Islam. Gerakan diawali dengan Aksi Bela Islam pada 14 Oktober 2016, disusul pada 4 November 2016 dan 2 Desember 2016 yang kemudian dikenal dengan Gerakan 411 dan Gerakan 212. Aksi tersebut menuntut agar Ahok diadili dan dipenjara. Munculnya gerakan-gerakan aksi tersebut bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta yang diikuti pasangan calon Anies Rasyied Baswedan – Sandiaga Salahudin Uno, Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat, dan Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni. Adanya gerakan-gerakan aksi bela Islam tersebut memunculkan berbagai dugaan, seperti

pudarnya otoritas keagamaan (Burhani, 2016); komunikasi politik yang dibangun umat Islam (Abdullah, 2017); serta kebangkitan politik identitas (Sari, 2016); (Khamdan & Wiharyani, 2018).

Berbicara mengenai politik identitas di Indonesia lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili oleh para elit dengan kebutuhannya masing-masing (Maarif & dkk, 2012). Politik identitas menurut Abdillah dalam Maarif, (2012) merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa (Maarif & dkk, 2012).

Politik identitas hadir sebagai bentuk perlawanan kelompok minoritas atau terpinggirkan akibat kegagalan mengakomodasi kepentingan minoritas. Dalam hal ini politik identitas menjadi sarana penyampaian aspirasi bagi kelompok minoritas. Namun, di era modern dewasa ini muncul 'kegagapan' dalam memahami struktur masyarakat yang semakin plural. Akibatnya semakin meningkat tindakan intoleransi (Abdullah, 2017).

Terkait dengan gerakan Aksi Bela Islam dan lanjutannya yang menarik adalah bahwa gerakan tersebut didominasi dari kalangan menengah muslim perkotaan (Wildan, 2016). Bahkan memunculkan generasi baru berupa gerakan intelektual Muslim yang rela melepaskan sekat-sekat organisasi, meninggalkan isu *furu'* serta tidak malu dicela (Suara Media, 2017).

Perbincangan mengenai kelas menengah muslim secara khusus tidak terlepas dari pengertian kelas menengah secara umum. Istilah kelas menengah mengacu pada definisi 'kelas' menurut Marx, dimana terdapat kelas yang mendominasi kepemilikan alat-alat produksi berhadapan dengan kelas yang tidak memiliki alat-alat produksi (Giddens, 1980). Sedangkan Evers dan Schiel (1991) menggunakan istilah 'kelompok strategis' untuk menggantikan istilah 'kelas' Marx.

Penerapan istilah 'kelas' untuk melihat kelas menengah di Indonesia memunculkan sikap kehati-hatian dari para peneliti. Bulkin (1984) menggunakan istilah 'golongan menengah' untuk membedakannya dengan kelas menengah di Eropa, dimana golongan menengah ini terdiri dari kaum intelektual, mahasiswa, pemimpin surat kabar, kaum pengusaha dan pedagang pribumi, ahli hukum dan kelompok-kelompok profesional lainnya (Bulkin, 1984). Menurut Zulkarnain, dkk (1993), peran kelas menengah dalam konteks perubahan sosial politik di Indonesia sulit dilakukan, mengingat istilah kelas menengah adalah 'khas'

terminologi masyarakat Eropa dan Amerika. Hal ini disebabkan oleh: Pertama, istilah kelas menengah tidak dikenal dalam masyarakat Indonesia. Kedua, eksistensi kelas menengah belum jelas sosoknya. Ketiga, jika kelas menengah ada dalam masyarakat Indonesia, terminologi siapa yang digunakan dalam menjelaskan perspektif kelas menengah Indonesia (Bone et al., 1993)

Di tengah kesulitan dalam menjelaskan mengenai sosok kelas menengah Indonesia, Rofhani (2013) memberikan batasan kelompok *middle class* sebagai golongan yang secara ekonomi di atas rata-rata, yang tingkat pendidikannya minimal strata satu (S1), memiliki tingkat mobilitas dan aksesibilitas yang cukup tinggi serta mempunyai kemampuan untuk memilih serta daya tawar yang tinggi, rasional dan hidup di perkotaan, serta kebanyakan mereka mendapatkan pendidikan umum (bukan sekolah agama) dan pekerjaan yang digelutinya sebagai seorang profesional yang bukan bidang agama, misalnya pengusaha, dokter, pegawai eksekutif, pengacara dan lain-lain. Sedangkan menurut Jati (2016), kelas menengah merupakan kelas masyarakat baru yang menampilkan sisi rasionalitas, material, maupun intelektualitas dari adanya kehidupan perekonomian yang semakin baik (Jati, 2016). Surya (2006) menyebutkan bahwa kelas menengah adalah para profesional yang memiliki pendidikan dan keterampilan tinggi, pendapatan memadai, gengsi/prestise profesi dan pekerjaan yang terikat dengan etika tertentu. Dalam hal ini dosen termasuk dalam kategori tersebut (Surya, 2006). Sedangkan kelas menengah muslim mengandung makna 'kelas menengah' dan 'muslim'. Menurut Ali dan Purwadi (2017) kelas menengah muslim adalah masyarakat yang memiliki daya dan juga religiusitas, dimana ajaran agama sangat menentukan

pola pikir dan pola perilaku (Ali & Purwandi, 2017).

Menurut Jati (2017) kelompok masyarakat kelas menengah muslim Indonesia memiliki sejumlah keunikan tersendiri. Pertama, kelas menengah muslim Indonesia merupakan kelompok eksklusif dalam kelas menengah Indonesia karena mereka memadukan nilai dan prinsip Islam di satu sisi dan modernitas di sisi yang lainnya. Kedua, adanya kaitan kelas menengah muslim dengan agenda global melalui konsep *ummah*. Ketiga, dimilikinya potensi sebagai kekuatan politik laten berhadapan dengan kelompok nasionalis. Keempat, adanya keinginan untuk diakui sebagai kelompok masyarakat karena selama ini dianggap sebagai kelompok marjinal (Jati, 2017).

Fenomena yang menarik dari kemunculan kelas menengah Muslim yang konsumtif adalah semangat kembali pada kehidupan agama. Bukti dari ketaatan tersebut dapat ditemui seperti ramainya simbol-simbol, atribut-atribut dan kegiatan-kegiatan pengajian di ruang publik, pelaksanaan umroh, haji, peci, jilbab, baju koko, menggantungkan kaligrafi, dan sebagainya (Arizal, 2016).

Pertautan perilaku kelas menengah Muslim yang konsumtif serta menguatnya ketaatan terhadap ajaran Islam telah membentuk identitas baru di Indonesia. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, dimana terdapat peristiwa penistaan agama dan munculnya berbagai gerakan aksi yang dilakukan oleh sejumlah kalangan umat Islam, maka menarik untuk dikaji mengenai pandangan kelas menengah Muslim terhadap politik identitas. Hal ini mengingat posisi strategis kelas menengah dalam proses demokratisasi, sehingga tindakannya berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Namun sebelum sampai ke sana, pengkajian terhadap instrumen pengukuran mutlak diperlukan untuk menjamin data yang diperoleh valid dan reliabel. Salah

satu cara untuk memperoleh data yang valid dan reliabel adalah dengan melihat apakah aitem-aitem yang tersusun dalam instrumen pengukuran tersebut adil, dalam arti tidak memiliki bias atau keberpihakan pada kelompok tertentu. Tulisan ini akan terfokus pada deteksi bias pada aitem-aitem dalam skala persepsi terhadap politik identitas pada kelas menengah muslim. Adapun kelompok yang dimaksud adalah kelompok jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dan kelompok keanggotaan dalam organisasi keagamaan (menjadi anggota atau tidak).

II. METODE

Subjek dalam penelitian ini adalah dosen tetap sebuah universitas islam di Bekasi. Pemilihan dosen sebagai kelas menengah mengacu pada kriteria kelas menengah menurut Surya (2006), yaitu profesional yang memiliki pendidikan dan keterampilan tinggi, pendapatan yang memadai, prestise profesi dan pekerjaan yang terikat dengan etika tertentu. Dengan demikian, teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan menggunakan skala persepsi terhadap politik identitas yang diuji reliabilitasnya menggunakan model Rasch (Surya, 2006). Pengujian reliabilitas dengan model Rasch menghasilkan tiga reliabilitas, yaitu *person reliability* (0,53), *item reliability* (0,96), dan *alpha cronbach reliability* (0,61) karena Rasch termasuk dalam *Item Response Theory* (IRT). Menurut Hambleton & Jones dalam Delosa (2016) Salah satu perbedaan antara teori klasik dan IRT adalah jika teori klasik berbasis tes, maka IRT berbasis aitem (Delosa, 2016). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji keberfungsian diferensial (*Differential Item Fuctioning—DIF*) Rasch.

III. HASIL

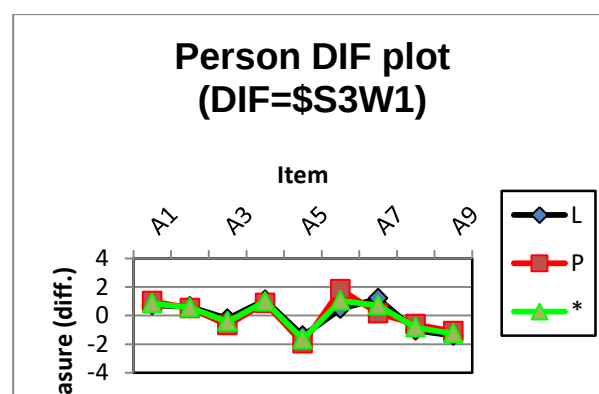
Uji keberfungsian diferensial (*Differential Item Fuctioning—DIF*) pada 9 aitem skala persepsi terhadap politik

identitas tidak memiliki bias baik pada laki-laki maupun perempuan, dengan nilai $p=1,0003-1,7755$, $p>0,05$. Menurut Sumintono dan Widhiarso (2014), bias dalam aitem dapat diketahui berdasarkan nilai probabilitas aitem yang berada di bawah 5% (0,05) (Sumintono & Widhiarso, 2014). Hal ini terlihat pada Tabel 1.

Aitem	Pernyataan	Probabilitas Aitem
1	Munculnya Gerakan 212 dan yang lainnya sebagai upaya melawan pemerintah.	1,4027
2	Munculnya Gerakan 212 dan yang lainnya dimotori oleh kelompok ormas Islam yang selama ini aspirasinya tertutup/tertindas.	1,7755
3	Munculnya Gerakan 212 dan yang lainnya sebagai bentuk kekecewaan terhadap penegakan hukum di Indonesia.	1,1885
4	Kelompok/orang Islam yang tidak setuju dengan Gerakan 212 dan yang lainnya dianggap sebagai kelompok yang tidak Islamis.	1,5387
5	Dalam memilih pemimpin saya lebih memilih yang seagama.	1,1520
6	Munculnya Gerakan 212 dan yang lainnya dapat meruntuhkan tatanan keberagaman di	1,0003

	Indonesia.	
7	Saya selalu menggunakan atribut/symbol agama dalam setiap kegiatan.	1,0031
8	Saya pernah menempuh pendidikan di pesantren.	1,2109
9	Saya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan (pengajian, istighosah, dll).	1,4099

Tabel 1. DIF ditinjau dari jenis kelamin



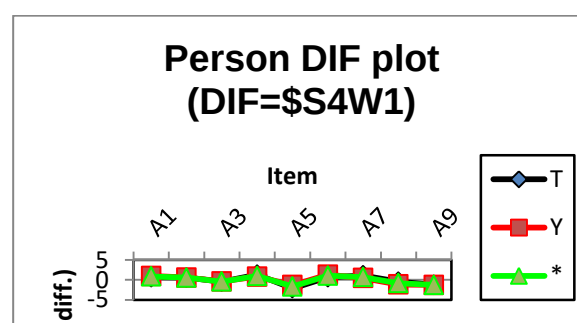
Grafik 1. Plot DIF ditinjau dari jenis kelamin

Uji keberfungsian diferensial (*Differential Item Functioning—DIF*) pada 9 aitem skala persepsi terhadap politik identitas juga tidak memiliki bias baik pada subjek yang menjadi anggota pada organisasi keagamaan maupun yang tidak menjadi anggota pada organisasi keagamaan, dengan nilai $p=1,0628-11,000$, $p>0,05$. Hal ini terlihat pada Tabel 2.

Aitem	Pernyataan	Probabilitas Aitem
1	Munculnya Gerakan 212 dan yang lainnya sebagai upaya melawan pemerintah.	1,3718
2	Munculnya Gerakan	1,9334

	212 dan yang lainnya dimotori oleh kelompok ormas Islam yang selama ini aspirasinya tertutup/tertindas.	
3	Munculnya Gerakan 212 dan yang lainnya sebagai bentuk kekecewaan terhadap penegakan hukum di Indonesia.	1,8219
4	Kelompok/orang Islam yang tidak setuju dengan Gerakan 212 dan yang lainnya dianggap sebagai kelompok yang tidak Islamis.	1,2257
5	Dalam memilih pemimpin saya lebih memilih yang seagama.	1,0399
6	Munculnya Gerakan 212 dan yang lainnya dapat meruntuhkan tatanan keberagaman di Indonesia.	1,0703
7	Saya selalu menggunakan atribut/symbol agama dalam setiap kegiatan.	1,0735
8	Saya pernah menempuh pendidikan di pesantren.	1,0628
9	Saya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan (pengajian, istighosah, dll).	11,0000

Tabel 2. DIF ditinjau dari keanggotaan pada organisasi keagamaan



Grafik 2. Plot *DIF* ditinjau dari keanggotaan pada organisasi keagamaan

IV. PEMBAHASAN

Salah satu karakteristik instrumen pengukuran yang baik adalah instrumen pengukuran yang aitem-aitemnya tidak memiliki bias atau keberpihakan terhadap kelompok tertentu. Apabila aitem suatu instrumen memiliki keberpihakan pada kelompok tertentu (bias), hal itu berarti instrumen tersebut tidak valid secara konstruktif (Alwi, 2011). Pada *Item Response Theory* (IRT), bias pada aitem dapat dilihat dari nilai uji keberfungsian diferensial (*Differential Item Functioning—DIF*).

Berdasarkan hasil pengujian keberfungsian diferensial, skala persepsi terhadap politik identitas tidak memiliki bias baik pada kelompok laki-laki dan perempuan ($p=1,0003-1,7755$, $p>0,05$) maupun pada kelompok yang menjadi anggota pada organisasi keagamaan dan yang tidak menjadi anggota pada organisasi keagamaan ($p=1,0628-11,000$, $p>0,05$). Hal ini berarti skala persepsi terhadap politik identitas adalah instrumen pengukuran yang valid secara konstruktif.

Berdasarkan Grafik 1, terlihat bahwa respon laki-laki dan perempuan terlihat berbeda pada aitem nomor 6 dan nomor 7. Aitem nomor 6 berbunyi “Munculnya Gerakan 212 dan yang lainnya dapat meruntuhkan tatanan keberagaman di Indonesia”. Pada aitem tersebut, respon setuju lebih ditunjukkan oleh subjek berjenis kelamin laki-laki. Hal

ini dikarenakan bahwa munculnya gerakan ini hanya sebuah “gerakan protes” dan “aksi solidaritas” yang rentan dalam menjaga isunya untuk jangka panjang (Sholikin, 2018). Sehingga mereka memandang tetap menjaga keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Aitem nomor 7 berbunyi “Saya selalu menggunakan atribut/symbol agama dalam setiap kegiatan”. Pada aitem ini, respon setuju ditunjukkan oleh subjek berjenis kelamin perempuan. Sebagaimana ditulis Rofhani (2017) bahwa budaya Islam, khususnya di kalangan perempuan kelas menengah muslim mengalami pergeseran. Mereka menunjukkan budaya baru yang berbeda dengan yang dilakukan kelompok fundamentalis dengan serban, kerudung dan jubah dengan warna tertentu (Rofhani, 2017). Secara umum, perempuan kelas menengah muslim rasional dan modernis, namun tetap menganut nilai-nilai normatif agama. Gatra Edisi Khusus Lebaran (2011) menulis mengenai pertumbuhan produk dan desain atribut agama Islam, seperti hijab, pakaian, salon, kosmetik. Dan sebagainya. Selain 2 aitem tersebut, respon yang ditunjukkan subjek laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda (Gatra Edisi Khusus Lebaran, 2011).

Berdasarkan Grafik 2, terlihat bahwa respon yang ditunjukkan oleh subjek yang menjadi anggota organisasi keagamaan maupun yang tidak menjadi anggota keagamaan tidak jauh berbeda. Respon yang sama ditunjukkan pada aitem nomor 2 dan nomor 3. Aitem nomor 2 berbunyi “Munculnya Gerakan 212 dan yang lainnya dimotori oleh kelompok ormas Islam yang selama ini aspirasinya tertutup/tertindas” dan aitem nomor 3 berbunyi “Munculnya Gerakan 212 dan yang lainnya sebagai bentuk kekecewaan terhadap penegakan hukum di Indonesia”. Kedua kelompok, baik yang menjadi anggota organisasi keagamaan maupun yang tidak, setuju dengan pernyataan tersebut. Menurut Wildan (2016), terjadinya Gerakan Aksi Bela Islam dan

lanjutannya dalam konteks demokrasi merupakan perwujudan tersumbatnya katup-katup demokrasi tidak berjalan baik (Wildan, 2016). Oleh karena itu, cara yang paling sederhana adalah dengan melakukan aksi massal turun ke jalan untuk menekan para pengambil kebijakan dalam penegakan hukum. Sholikin (2018) menyebut bahwa Aksi Bela Islam merupakan sebuah “gerakan protes” dan “aksi solidaritas” (Sholikin, 2018).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji keberfungsian skala persepsi instrumen politik identitas pada kelas menengah muslim tidak memiliki bias, baik kepada kelompok laki-laki dan perempuan maupun kepada kelompok yang menjadi anggota kelompok keagamaan dan yang tidak menjadi anggota kelompok keagamaan. Namun, ada beberapa aitem yang memiliki respon berbeda yang perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai adanya perbedaan tersebut. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa skala persepsi terhadap politik identitas adalah instrumen pengukuran yang valid secara konstruktif.

VI. REFERENSI

- Abdullah, A. (2017). Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: Antara Politik Identitas dan Ijtihad Politik Alternatif. *Jurnal An-Nida'*, 41.
- Ali, H., & Purwandi, L. (2017). *Indonesia Middle Class Muslim: Religiosity and Consumerism*. Alvara Research Center.
- Alwi, I. (2011). Perbandingan kepekaan model mantel haenszel dan model rasch dalam mendeteksi keberbedaan fungsi butir ditinjau dari ukuran sampel. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 2, 18–29.
<https://doi.org/doi.org/10.21009/JEP.021.02>.
- Arizal, J. (2016). Kritik Moeslim Abdurrahman Terhadap Budaya

- Konsumerisme Kelas Menengah.
Jurnal Lisan Al-Hal, 8.
- Bone, Z. H., Siagian, F., & (Ed), L. I.
(1993). *Kelas Menengah Digugat*.
Fikahati Aneska.
- Bulkin, F. (1984). Kapitalisme, Golongan
Menengah dan Negara: Sebuah
Catatan Penelitian. *Prisma*, 2.
- Burhani, A. N. (2016). Aksi Bela Islam:
Konservatisme dan Fragmentasi
Otoritas Keagamaan. *Maarif*, 11.
- Delosa, J. (2016). Validation of the Pre-
licensure Examination for Pre-service
Teachers in Professional Education
Using Rasch Analysis. In *Pacific Rim
Objective Measurement Symposium
(PROMS) 2015 Conference
Proceedings*. Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-981-10-1687-5>
- Gatra Edisi Khusus Lebaran. (2011).
Napas Islam Industri Kreatif.
- Giddens, A. (1980). *Class Structure in
Advanced Society*. Hutchinson.
- Jati, W. R. (2016). Memaknai Kelas
Menengah Muslim sebagai Agen
Perubahan Sosial Politik Indonesia.
Al-Tahrir, 16.
- Jati, W. R. (2017). Radikalisme Politik
Kelas Menengah Muslim Indonesia
Pasca Reformasi. *Miqot*, XLI.
- Khamdan, M., & Wiharyani. (2018).
Mobilisasi Politik Identitas dan
Kontestasi Gerakan
Fundamentalisme. *Al-Tahrir*, 18.
- Maarif, A. S., & dkk. (2012). *Politik
Identitas dan Masa Depan Pluralisme
Kita*. Democracy Project.
- Rofhani. (2017). Ekspresi dan Representasi
Budaya Perempuan Muslim Kelas
Menengah di Surabaya. *Islamica:
Jurnal Studi Keislaman*, 11.
- Sari, E. (2016). Kebangkitan Politik
Identitas Islam pada Arena Pemilihan
Gubernur Jakarta. *Kritis Jurnal Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin*, 2.
- Sholikin, A. (2018). Islamic Political
Movement in Indonesia After 'Aksi
Bela Islam Jilid I, II and III''.
*Madani Jurnal Politik Dan Sosial
Kemasyarakatan*, 10.
- Suara Media. (2017). *Aksi 212 dan 5
Fenomena Lahirnya*.
Suaramedia.Com. <http://www.suara-media.com/2017/03/aksi-212-dan-5-fenomena-lahirnya.html>
- Sumintono, B., & Widhiarso, W. (2014).
*Aplikasi model Rasch untuk penelitian
ilmu-ilmu sosial*. Trim Komunikata
Publishing House.
- Surya, A. (2006). Pembentukan Kelas
Menengah Kota: Peran dan Implikasi
Keberadaannya Terhadap Percepatan
Pembangunan. *Jurnal Industri Dan
Perkotaan*, XI.
- Wildan, M. (2016). Aksi Damai 411-212,
Kesalehan Populer, dan Identitas
Muslim Perkotaan Indonesia. *Maarif*,
11.